

## MODEL PERLINDUNGAN ANAK-ANAK PEKERJA MIGRAN DI MALAYSIA

Tyas Retno Wulan<sup>1</sup>, Muslihudin<sup>2</sup>, Sri Wijayanti<sup>3</sup>, Jarot Santoso<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>FISIP Universitas Jendral Soedirman

<sup>1</sup>Tyas.wulan@unsoed.ac.id

### ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), saat ini ada sekitar 6,5 juta PMI yang bekerja di 142 negara seluruh dunia. Pada tahun 2021 diberangkatkan 276.553 PMI ke berbagai negara, 69 persennya (191.237 orang) adalah pekerja migran perempuan dan paling banyak bekerja pada sektor informal. Data dari *World Migration Report 2020*, Remitansi PMI sebesar US 10,97 Milyard (setara dengan 6,9 persen pendapatan APBN) dan menempatkan Indonesia menjadi 10 besar negara di Asia berdasarkan penerimaan remitansi (*Jurnal Perempuan*, 2020) Sebagian besar PMI adalah perempuan seiring peluang kerja yang lebih besar di sektor domestik dan industri manufaktur. Komposisi pekerja migran perempuan dibandingkan PMI secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir reratanya adalah 71%. Pada tahun 2020 komposisi PMI perempuan bahkan mencapai 80% (Pusdatin BP2MI, 2021). Penelitian tentang anak pekerja migran yang ditinggalkan (*Children Left Behind/CLB*) yang dilakukan Wulan dkk (2018, -2019) dan sudah menghasilkan model perlindungan untuk para CLB ternyata belum menjangkau anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, yang meskipun tidak ditinggalkan, karena mereka ikut bersama kedua orang tuanya yang bekerja di Malaysia, justru menghadapi permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika anak-anak PMI di Malaysia dan Menyusun model untuk melindungi mereka, sehingga hak-hak dasar mereka terpenuhi. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan FGD dengan anak-anak PMI serta stake holder terkait. Hasil penelitian menunjukkan problema yang dihadapi anak-anak PMI di Malaysia antara lain ada anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan (akta kelahiran dan paspor) sehingga menyulitkan akses Pendidikan dan Kesehatan. Pihak yang selama ini dianggap berkontribusi untuk melindungi mereka adalah Konsulat, Para Guru di CLC, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perusahaan (company) yang mempekerjakan orang tua mereka diharapkan bisa lebih berkontribusi.

**Kata kunci:** *Perlindungan; Anak; Pekerja Migran; Malaysia; Pendidikan*

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), saat ini ada sekitar 6,5 juta PMI yang bekerja di 142 negara seluruh dunia. Pada tahun 2021 diberangkatkan 276.553 PMI ke berbagai negara, 69 persennya (191.237 orang) adalah pekerja migran perempuan dan paling banyak bekerja pada sektor informal. Data dari *World Migration Report*

2020, Remitansi PMI sebesar US 10,97 Milyard (setara dengan 6,9 persen pendapatan APBN) dan menempatkan Indonesia menjadi 10 besar negara di Asia berdasarkan penerimaan remitansi (Jurnal Perempuan, 2020) Sebagian besar PMI adalah perempuan seiring peluang kerja yang lebih besar di sektor domestik dan industri manufaktur. Komposisi pekerja migran perempuan dibandingkan PMI secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir reratanya adalah 71%. Pada tahun 2020 komposisi PMI perempuan bahkan mencapai 80% (Pusdatin BP2MI, 2021). Penelitian tentang anak pekerja migran yang ditinggalkan (Children Left Behind/CLB) yang dilakukan Wulan dkk (2017, 2019) dan sudah menghasilkan model perlindungan untuk para CLB ternyata belum menjangkau anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, yang meskipun tidak ditinggalkan, karena mereka ikut bersama kedua orang tuanya yang bekerja di Malaysia, justru menghadapi permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan pemenuhan hak anak. Malaysia merupakan negara tujuan utama para PMI.

Data Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2018 PMI yang ditempatkan ditempatkan di berbagai negara pada 2018 mencapai 283.640 pekerja. Dari jumlah tersebut, 47% pekerja bekerja di bidang formal dan 53% bekerja di bidang informal yang tersebar lebih di 20 jenis pekerjaan. BNP2TKI juga mencatat terdapat 20 negara dengan jumlah PMI terbanyak. Dari 20 negara tersebut, Malaysia merupakan negara tujuan utama PMI, yaitu mencapai 90.671 pekerja atau hampir sepertiga dari total PMI yang bekerja di luar negeri (BNP2TKI, 2018) Anak-anak para pekerja migran pada dasarnya memiliki peluang untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta di Malaysia. Akan tetapi untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta tersebut membutuhkan biaya yang besar bagi para pekerja migran. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan seperti dokumen pribadi anak. Hal ini karena sebagian dari anak pekerja migran lahir dan besar di Malaysia. Bahkan, di antaranya berstatus ilegal karena tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi kependudukan. Status ilegal tersebut menyebabkan banyak anak warga negara Indonesia (WNI) tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. (UN Dewi, 2018) (Windary, 2013). Selain itu regulasi setempat mengatur bahwa pekerja asing tidak diperbolehkan untuk membawa keluarga. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak anak, antara lain permasalahan terhadap akses pendidikan (Wuryandari,2016) ; (Wahyudi 2018);

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam, dan FGD serta observasi dengan anak-anak PMI penerima beasiswa afirmasi Pendidikan tinggi (ADIK) TKI. Anak-anak ini dipilih karena dapat menceritakan problema yang dihadapi pada saat mereka masih di Sabah dan mampu mengemukakan harapan-harapan mereka untuk perlindungan bagi teman-teman mereka. Saat ini penerima beasiswa ADIK TKI masih sangat terbatas. Selain itu untuk menambah informasi juga dilakukan wawancara dengan para stake holder antara lain pihak Kementerian Luar Negeri, serta studi pustaka untuk melengkapi data primer hasil wawancara dengan para informan utama dan tambahan tersebut di atas.

## **3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI**

### **3.1. Problematika Yang Dihadapi Anak Pekerja Migran di Malaysia**

Saat ini di Sabah, Malaysia tercatat ada 600 WNI yang tinggal disana, dan diperkirakan 50 persennya tidak memiliki dokumen. Mereka tinggal dari generasi ke generasi, bekerja di

perkebunan kelapa sawit dan tidak memiliki dokumen. Hal ini berimplikasi pada anak-anak PMI yang tidak memiliki dokumen resmi dan tidak semuanya bisa menenyam pendidikan formal di Malaysia. Untuk itu Kemenlu melalui kantor perwakilan RI di Sabah memberikan afirmasi untuk pendidikan anak-anak PMI di Sabah, dengan mendatangkan guru dan mendirikan SIKK (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu) Sejak tahun 2006, setiap tahun ada guru yang dikirimkan untuk mengajar di Sabah. Pada tahun 2019 ini, ada 100 guru yang diberangkatkan. Pengiriman guru ke Malaysia ini merupakan yang ke-9 kalinya sejak 2006 lalu. Hingga saat ini, sudah 290 guru Indonesia akan mengajar di 294 PKBM di Malaysia. Dengan rincian 155 mengajar di jenjang sekolah dasar (SD) dan 139 sekolah menengah pertama (SMP). PKBM atau yang lebih dikenal dengan Community Learning Center (CLC) adalah lembaga formal bentukan masyarakat yang muncul atas prakarsa masyarakat. Lembaga ini dikelola oleh masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tersebut (Kompas.com, 22 November 2018).

Selain bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan SIKK, Kemenlu, dalam hal ini perwakilan RI di Tawau juga memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk anak-anak PMI dengan memfungsikan kantor perwakilan bisa menjadi semacam dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengurus dokumen seperti akta kelahiran. Kemudahan untuk mengurus dokumen ini menjadi sangat urgen bagi para anak PMI yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan membuat mereka kesulitan mengakses hak-hak dasar bagi anak, misalnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Mulai tahun 2018, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Kemahasiswaan menyediakan alokasi beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Penjangkauan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akan dilakukan melalui Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Pada tahun 2018, diberikan beasiswa afirmasi kepada 123 anak PMI di Sabah untuk kuliah di semua PTN di seluruh Indonesia. Lima diantara peraih beasiswa tersebut saat ini menempuh kuliah di berbagai jurusan di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan mereka selain merasa bangga dan sangat bruntung bisa kuliah di Indonesia, mereka menekankan bahwa motivasi dan semangat orang tua dan guru di CLC memegang peran penting sehingga mereka bisa kuliah di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para anak PMI berhasil diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Persoalan Kependudukan (antara lain tidak memiliki akta kelahiran, ada yang tidak punya paspor meskipun saat ini berada di Indonesia, ada juga yang paspor keluarga mereka dipegang pihak company(perusahaan))
2. Persoalan Pendidikan, karena tidak semua anak bisa meneruskan sekolah sampai jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk SMA dan Perguruan Tinggi peluang bisa diterima oleh mereka yang punya beasiswa dan jumlahnya sangat terbatas.

### **3.2. Model Perlindungan Yang Diharapkan Anak-Anak PMI**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak PMI yang telah dijelaskan pada sub bab di atas, diidentifikasi beberapa pihak yang dianggap mampu berkontribusi lebih banyak dalam memberikan perlindungan pada anak-anak PMI mereka adalah:

1. Pihak Konsulat (Kementrain Luar Negeri) yang diharapkan mampu menyediakan dokumen kependudukan yang dibutuhkan antara lain akta kelahiran dan paspor:
2. Guru-guru yang selama ini didatangkan dari Indonesia dianggap merupakan “penyelamat” bagi anak-anak PMI karena mereka merupakan jembatan agar anak-anak CLC (setara SMP) mampu melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

- di Indonesia (baik level SMA ataupun Perguruan Tinggi) dengan cara mengenalkan akses Pendidikan yang lebih baik dan membangun cita-cita mereka
3. Pihak Kemendikbud yang diharapkan menambah kuota beasiswa ADIK TKI
  4. Company (Perusahaan yang mempekerjakan orang tua mereka di perkebunan kelapa sawit) diharapkan memberikan ijin pendirian CLC dan memberikan fasilitas (kegiatan upacara bendera setiap senin, pramuka)
  5. Pemerintah Malaysia diharapkan memberikan banyak kegiatan untuk Jambore pramuka Indonesia dan Malaysia

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan problema yang dihadapi anak-anak PMI di Malaysia adalah persoalan Kependudukan (antara lain tidak memiliki akta kelahiran, ada yang tidak punya paspor meskipun saat ini berada di Indonesia, ada juga yang paspor keluarga mereka dipegang pihak company(perusahaan). Persoalan Pendidikan, karena tidak semua anak bisa meneruskan sekolah sampai jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. Pihak yang selama ini dianggap berkontribusi untuk melindungi mereka adalah Konsulat, Para Guru di CLC, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perusahaan (company). Pihak-pihak tersebut dianggap mampu berkontribusi untuk Menyusun perlindungan bagi anak PMI di Malaysia.

#### **REKOGNISI**

Terimakasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Jendral Soedirman melalui pendanaan hibah riset Internasional Collaboration, KBRI Kinabalu, dan Para Mahasiswa hebat penerima beasiswa ADIK TKI Unsoed yang menjadi bagian dari tulisan ini

#### **REFERENSI**

- Sigiro, A. N., Gina, A., & Komalasari, D. 2020. Potret Dampak Penerapan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interaksional. (Jurnal Perempuan, 25(4), 295–308).
- Indah Pertiwi, Tyas Retno Wulan, Hendri Restuadhi. 2018. The Role of Left-Behind-Children Caretaker in Improving Learning Motivation Study in Adipala District, Cilacap Regency, Central Java Indonesia. (International Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 8 • No. 12 • December 2018).
- Wulan, Tyas Retno dkk. 2017. Ayah Tangguh Keluarga Utuh: Pola Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Banyumas, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen).
- Wahyudi, R. 2018. Hak Pendidikan Anak- Anak Buruh Migran di Malaysia Masih Sulit Dipenuhi oleh Negara. (Buruhmigran.or.id , Maret 01). Diakses pada 2 Maret 2018 di <https://buruhmigran.or.id/2018/03/01/httpsburuhmigran-or-id20180301hak-pendidikan-anak-anak-buruh-migran-di-malaysia-masih-sulit-dipenuhi-oleh-negara/>
- Windary, S. 2013. Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah. (Tesis S2 Tesis S2, Ilmu Hubungan Internasional UGM, Yogyakarta).

U N, Dewi. 2018. Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia. (Prosiding Seminar Internasional APPPTMA, Jakarta 2018).

Kompas.com. 2018. Jamin Pendidikan Anak-anak TKI di Malaysia, Pemerintah Kirim 100 Guru. (Kompas.com 22 November 2018). Diakses di <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/22/20472711/jamin-pendidikan-anak-anak-tki-di-malaysia-pemerintah-kirim-100-guru>.